

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Preferensi Pajak

Teori preferensi pajak menjelaskan bahwa investor cenderung lebih menyukai keuntungan modal jika dibandingkan dengan dividen. Berdasarkan latar belakang penelitian, sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai kebijakan dividen, namun masih terdapat ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan dividen. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Tarif pajak dividen lebih besar dibandingkan tarif pajak capital gain. Namun, keuntungan dari capital gain tidak memberikan kepastian di masa mendatang sehingga perusahaan harus tetap menjaga pembayaran dividen kepada investor, meskipun dalam jumlah kecil. Investor juga menyukai perusahaan yang membayar dividen rendah karena alasan pajak. Sementara itu, teori preferensi pajak memberikan penjelasan yang lebih relevan mengenai tingkat pendapatan bagi investor, yaitu tingkat dividen atau capital gain dan jumlah pendapatan setelah dikurangi pajak (Ifada & Nurcahyono, 2024)

2.1.2 *Signalling Theory*

Teori signal yaitu sinyal yang disampaikan oleh pemilik informasi, seperti laporan keuangan, pengumuman publik, atau kebijakan perusahaan

yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, prospek bisnis, dan strategi perusahaan kepada pihak eksternal, sehingga membantu mereka dalam menilai risiko dan peluang investasi. *Signaling* adalah informasi yang dibuat oleh manajer terkait kebijakan atau keputusannya sebagai panduan bagi para pemegang saham untuk menganalisis potensi perusahaan di masa depan. Sinyal yang dimaksud adalah informasi penting dari manajemen yang disampaikan sehubungan dengan kebijakan atau keputusannya yang berdampak pada perusahaan (Yesi, et al., 2023).

2.1.3 Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen adalah keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi harga saham karena menurut Investor lebih menyukai pengembalian yang berasal dari dividen dibandingkan dengan capital gain. Pembayaran dividen yang besar tidak selalu dapat meningkatkan harga saham perusahaan (Ilyas & Hertati, 2022).

Kebijakan dividen adalah kebijakan dari kesepakatan pemegang saham berupa kesepakatan dalam perhitungan besaran keuntungan yang dibayarkan sebagai dividen dan sebagai laba ditahan kebijakan dividen terkait dengan pembagian dividen adalah bagian dari pengawasan perusahaan terhadap pemegang saham. Kebijakan Dividen bisa diukur dari rasio kebijakan dividen atau *Dividend Payout Ratio* (Indarwati, & Nur, 2023).

Setiap perusahaan memiliki dua perlakuan alternatif terhadap laba bersih sesudah pajak yakni, dibagikan kepada para pemegang saham berupa dividen atau diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Dalam membagikan laba bersih setelah pajak, perusahaan harus memiliki keputusan mengenai besarnya laba bersih setelah pajak yang dibagikan perusahaan dalam bentuk dividen (Yuni, 2022).

Kebijakan dividen adalah bagian dari keuntungan perseroan yang diputuskan oleh Direksi dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham dan akan dikembalikan kepada pemegang saham. Tujuan utama perusahaan adalah untuk membagi dividen kepada setiap pemilik. Karena pembagian adalah tujuan utama, hak suara pemegang saham harus memberikan persetujuan. Karena itu adalah investasi dalam ekuitas perusahaan, dividen sangat diinginkan oleh para investor yang biasanya berasal dari laba bersih. Namun, sebagian besar dari keuntungan juga akan disimpan oleh perusahaan sebagai laba yang ditahan. Segala profit yang didapat perusahaan akan dialokasikan untuk kegiatan operasional yang ada maupun yang akan datang, dan sisanya akan dibagikan untuk para investor sebagai pembayaran dividen (Yuliyanti, & Turmudhi, 2024)

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah praktik penghindaran pajak tanpa melanggar hukum (*Justice Reddy*). Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan (*Black's Law Dictionary*).

Penghindaran pajak dapat terjadi, karena, korporasi, melihat pajak sebagai, beban, sehingga, prinsipal lebih senang jika, agen melakukan tindakan pajak yang agresif. Masalah besar yang dihadapi, Indonesia, dan negara, lain dalam hal perpajakan adalah rendahnya, tingkat kepatuhan pajak dan hilangnya, penerimaan pajak karena, penghindaran pajak yang tinggi, (Arizah et al., 2024).

Sistem pengenaan pajak di, Indonesia, diterapkan melalui, *self assessment system*, wajib pajak bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang terutang secara, independen. Direktorat Jenderal Pajak bertindak sebagai, pengawas untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dianggap sebagai, beban dan berdampak pada, laba, bersih perusahaan. Pengenalan *self assessment system* membuka, peluang bagi, wajib pajak untuk mencari, metode supaya, dapat mengurangi, jumlah pajak yang seharusnya, disetor ke negara. Dalam melakukan hal ini, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak secara, legal atau ilegal, yang mencakup penghindaran pajak (Oktaviani, & Cahyamustika, 2024).

Tax avoidance merupakan “Upaya, penghindaran pajak yang dilakukan secara, legal dan aman bagi, wajib pajak karena, tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang . *Tax avoidance* adalah suatu skema, transaksi,

yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara, masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (Saragih & Rusdi, 2022).

2.1.5 Transaksi pihak berelasi

Transaksi pihak berelasi didefinisikan sebagai kegiatan untuk mentransfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dan pihak berelasi, terlepas dari apakah transfer tersebut akan dikenakan harga, atau tidak. Transaksi pihak berelasi adalah salah satu bidang yang terus diperhatikan oleh skandal-skandal perusahaan saat ini. Hal ini disebabkan oleh transaksi pihak berelasi merupakan transaksi yang cukup kompleks dan beragam yang terjadi antar pihak berelasi, transaksi pihak berelasi juga dapat dikatakan sebagai *efficient transactions hypothesis* apabila transaksi pihak berelasi dapat secara efisien memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendasari perusahaan (Yaputri et al., 2023).

Transaksi pihak berelasi (RPT) mengacu pada transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antara pihak berelasi, terlepas dari apakah suatu harga dibebankan. Transaksi pihak berelasi biasanya dilakukan oleh perusahaan yang dikendalikan dengan afiliasi perusahaan atau afiliasi anggota direksi, anggota dewan dan pemegang saham utama perusahaan atau antara

perusahaan yang dibawah kendali yang sama. Selain terjadi pada perusahaan afiliasi, transaksi pihak terkait terjadi antara perusahaan dan manajemen eksekutif teratasnya, anggota dewan direksi, atau kerabat keluarga dekat dari individu-individu ini (Wukirasih et al., 2022)

Transaksi pihak berelasi atau *Related Party Transaction* (RPT) merupakan segala bentuk transaksi pengalihan aset, liabilitas, atau pemberian jasa yang terjadi antara suatu entitas pelapor dan pihak lain yang memiliki hubungan terkait dengannya. Transaksi ini melibatkan pertukaran uang atau bahkan tidak. PSAK 7, menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi merujuk pada situasi di mana sumber daya, jasa, atau kewajiban dipindahkan antara entitas pelapor dan pihak-pihak berelasi, tanpa memperhatikan apakah ada biaya yang dikeluarkan terkait transaksi tersebut (Nahumury & Agus Irwandi, 2024).

2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan, yang mana perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasinya karena hal tersebut merupakan berita baik. Perhitungan yang digunakan dalam menentukan tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan menggunakan *return on asset* (ROA), yaitu perbandingan antara tingkat profit (laba bersih) yang dihasilkan perusahaan dengan total aset yang perusahaan miliki. Dengan menggunakan rasio profitabilitas dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang maksimal. Perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik,

karyawan, serta menambah mutu produk dan melakukan investasi baru, jika perusahaan memperoleh laba yang maksimal. Profitabilitas yang tinggi juga memperlihatkan bahwa perusahaan mampu untuk membayar dan meningkatkan pembagian dividen setiap tahunnya, sehingga tingkat profitabilitas sangat mempengaruhi pengambilan keputusan pemegang saham dan investor untuk mengukur tingkat pengembalian yang didapat pada investasi yang dilakukannya di perusahaan tersebut. Profitabilitas yang tinggi juga memperlihatkan bahwa perusahaan mampu untuk membayar dan meningkatkan pembagian dividen setiap tahunnya (Nurul et al., 2022).

Tujuan akhir yang dicapai oleh sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur jumlah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa menguntungkan suatu perusahaan, dengan menggunakan semua elemen perusahaan yang terkandung di dalamnya untuk mencapai keuntungan yang maksimal, maka dapat disimpulkan bahwa rasio tersebut adalah. Indikator profitabilitas ini biasanya digunakan oleh investor sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi saham di suatu perusahaan (Khrisnawati & Saputri, 2022).

profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan asset maupun modal untuk memperoleh laba terkait dengan penjualan perusahaan. Profitabilitas dapat menjadi salah satu

indicator kinerja perusahaan yang mana juga digunakan sebagai salah satu ukuran dalam menentukan kebijakan dividen. Dividen akan dibagikan oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut mampu mendapatkan profit. Hal ini dilakukan perusahaan untuk memberikan signal terhadap investor akan keberhasilan perusahaan mengelola perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menandakan perusahaan mampu memanfaatkan asset secara efisien sehingga dapat menghasilkan laba. Indikator yang digunakan dalam mengukur profitabilitas yaitu Return on Assets (ROA). Semakin tinggi tingkat ROA, atau profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin besar pula pengembalian bagi investor karena ROA merupakan salah satu variabel yang dapat menunjukkan kinerja suatu perusahaan (Isthika & Purwantoro, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, berikut disajikan rincian mengenai penelitian terdahulu mampu mendukung data atau informasi yang digunakan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

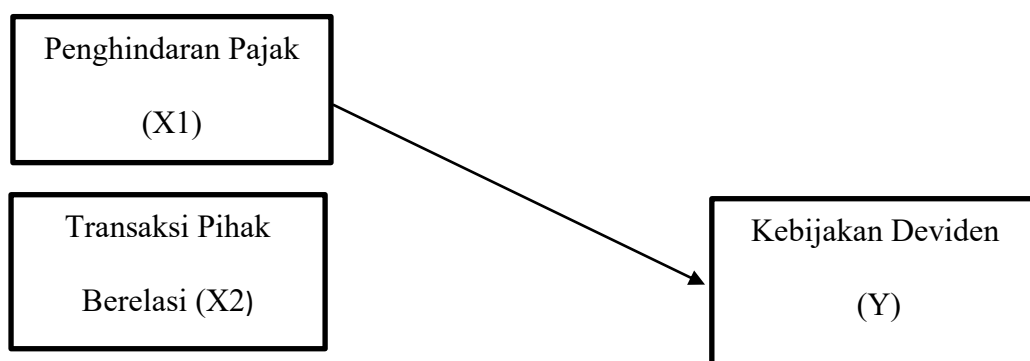
No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ifada, & Nurcahyono, (2024)	Faktor Penentu Kebijakan Dividen: Bukti dari Bursa Efek Indonesia	1. Penghindaran pajak berpengaruh terhadap kebijakan dividen 2. Transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap kebijakan dividen 3. Modal intelektual berpengaruh terhadap kebijakan dividen
2.	Meidawati, (2020)	Faktor-Faktor Yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan

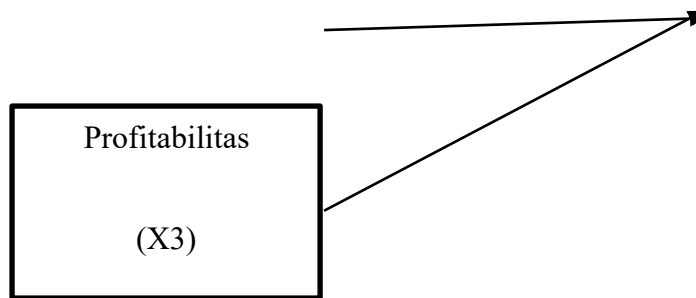
		Mempengaruhi Kebijakan Dividen	ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan likuiditas berpengaruh negatif signifikan.
3.	Rahman&Hasanuddin, (2022)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas (ROA), <i>leverage</i> (DER) likuiditas (CR) dan <i>firm size</i> berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen sub sektor farmasi. Secara parsial, hanya variabel likuiditas (CR) yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen sedangkan variabel profitabilitas (ROA), <i>leverage</i> (DER) dan <i>firm size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen sub sektor farmasi.
4.	Nur, (2022)	KeBijakan Dividen: Bukti Empiris Di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memberikan kontribusi yang nyata terhadap kebijakan dividen sedangkan volatilitas pendapatan tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap kebijakan dividen, <i>leverage</i> tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap kebijakan dividen dan pertumbuhan perusahaan tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap kebijakan dividen.
5.	Santikah&Syahzuni, (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Tunai	kebijakan dividen dipengaruhi oleh <i>free cash flow</i> secara positif, kebijakan dividen dipengaruhi oleh <i>leverage</i> secara negatif, kebijakan dividen dipengaruhi oleh profitabilitas secara

			positif, kebijakan dividen dipengaruhi pertumbuhan aset secara negatif, kebijakan dividen dipengaruhi oleh ukuran perusahaan secara positif.
6.	Hafni & Safari, (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa <i>Free Cash Flow</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020. Kebijakan Hutang, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020. <i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan pemecahan masalah dan memperlihatkan hubungan antara variabel. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini:





Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pedoman dalam penelitian, sebagai berikut.

Tabel 2.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
Kebijakan Dividen (Y)	Kebijakan dividen merupakan salah satu topik yang paling kontroversial dalam literatur keuangan dan telah menjadi subjek pemodelan teoritis intensif dan objek penelitian empiris yang berulang.	$DPR = \frac{\text{Total Dividen}}{\text{Laba Bersih}}$ (Goldwin & Handayani, 2022)	Rasio
Penghindaran Pajak (X1)	Transaksi penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

	meminimalisir kewajiban perpajakan perusahaan.	(Sofyawati, & Rohman, 2024)	
Transaksi Pihak Berelasi (X2)	Transaksi dengan pihak berelasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen.	$RPT = \frac{\text{Total Piutang Dari Pihak Terkait}}{\text{Total Aset}}$ (Ramadana et al., 2024)	Rasio
Profitabilitas (X3)	Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula.	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$ (Rahayu & Amalia, 2022)	Rasio

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah pernyataan yang dibuat oleh peneliti yang dapat diuji melalui eksperimen atau observasi. Hipotesis ini adalah dugaan awal tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji dalam penelitian. Hipotesis penelitian memainkan peran penting dalam memberikan arah dan fokus pada penelitian, serta menetapkan dasar untuk analisis dan interpretasi data.

2.5.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kebijakan Dividen

Penghindaran pajak akan mempengaruhi laba bersih yang diperoleh perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Perusahaan tersebut juga memiliki cukup dana untuk membayar

dividen kepada investor investor akan memandang perusahaan tersebut sebagai perusahaan dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih kecil atau bahkan perusahaan yang memiliki rasio pembayaran dividen nol, yang berarti perusahaan tersebut tidak membayar dividen kepada investor. Investor menghindari risiko, sehingga perusahaan dengan risiko yang lebih kecil cenderung lebih diminati dan dipercaya oleh investor (Adlan, 2021).

Penghindaran pajak adalah pembayaran pajak sekecil mungkin dengan menggunakan peluang perencanaan pajak yang sah. Tindakan yang memberikan akibat terhadap kewajiban pajak salah satunya adalah penghindaran pajak, yang dapat dilakukan dengan tindakan tertentu untuk mengurangi pajak. Dengan adanya penghindaran pajak maka arus kas yang disediakan bagi perusahaan cukup besar. Karena itu hal tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang menyimpang seperti menggunakan arus kas untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan perusahaan (Hutabarat, 2020).

H1: Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen

2.5.2 Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Kebijakan Dividen

Transaksi dengan pihak berelasi berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, dan ini menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi dapat meningkatkan efisiensi dengan mentransfer sumber daya, kewajiban, dan utang kepada pihak lain. Proyeksi transaksi pihak berelasi dengan transaksi pihak berelasi piutang lain-lain berpengaruh signifikan

terhadap variabel proyeksi dividen dengan rasio pembayaran dividen, yang berarti H2 diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor afiliasi, transaksi, pembagian kas, Laba, yang menjadi dasar pembagian dividen dipengaruhi oleh berdasarkan penjualan. Oleh karena itu, semakin banyak transaksi, penjualan dengan pihak terafiliasi akan sangat mempengaruhi laba, perusahaan. Semakin besar laba, perusahaan, maka semakin besar pula dividen kas yang dapat dibagikan (Ifada, & Nurcahyono, 2024).

RPT juga berpengaruh pada kebijakan dividen dimana dengan adanya RPT yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali akan mengurangi peluang perusahaan untuk mendistribusikan dividen. Pemegang saham pengendali mengambil keuntungan pribadi dari RPT yang dilakukan seperti divestasi perusahaan subsidiaries, penjualan atau pembelian aset tetap, dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Tindakan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen melalui aktivitas RPT berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen (Vivianty et al., 2023).

H2: Transaksi Pihak Berelasi berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen

2.5.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen

Profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba bersih dari aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan. Berdasarkan *signaling hypothesis*, pihak manajemen akan membayarkan dividen lebih tinggi untuk memberikan sinyal kepada investor mengenai keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan profit atau

laba. Sinyal ini mengartikan bahwa, kemampuan perusahaan untuk membayar dividen merupakan fungsi dari keuntungan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh menunjukkan semakin besar arus kas perusahaan sehingga kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen juga semakin tinggi. Pernyataan bahwa, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen (Yesi et al., 2023).

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba, atau keuntungan semakin tinggi, profitabilitas suatu perusahaan artinya semakin baik. Pembayaran dividen dilakukan pada saat perusahaan memperoleh laba yang tinggi, sehingga profitabilitas memiliki pengaruh dalam pembagian dividen kepada pemegang saham. Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula dividen yang akan diperoleh pemegang saham. Sebaliknya, semakin rendah profitabilitas perusahaan maka pembagian dividen akan rendah atau tidak adanya pembagian dividen. Jadi, pihak manajemen perusahaan akan berusaha memperoleh laba sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemampuan membayar dividen (Puspitaningtyas, 2019).

Rasio profitabilitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah Return on assets (ROA). ROA dipilih untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROA, maka dapat menarik minat investor untuk berinvestasi didalam perusahaan

sehingga harga saham akan naik secara otomatis dapat meningkatkan nilai perusahaan (Setiorini et al., 2019).

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen